

RENCANA KERJA

KECAMATAN PULAU SELUAN

TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan, tugas dan fungsi Camat adalah merumuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup urusan pelayanan kepada masyarakat, merumuskan kebijakan tentang perizinan, pengelolaan ekonomi dan pembangunan, pengelolaan pendidikan dan kesehatan, sosial dan kesejahteraan, mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban umum merumuskan kebijakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, mengkoordinasikan administrasi umum dan mengkoordinasikan pengelolaan keuangan kecamatan.

Untuk menjalankan tugas tersebut, Camat menjalankan fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang perizinan;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum kepada masyarakat;
c. pembinaan urusan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
d. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga;
e. pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan di desa dan/atau kelurahan;
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Kecamatan Pulau Seluan merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Pulau Seluan yang mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Natuna. Renja Kecamatan Pulau Seluan memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Pulau Seluan dalam satu tahun anggaran sekaligus menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Selain itu Renja Kecamatan Pulau Seluan mengakomodasikan hasil Musrenbang RKPD dan Forum Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna diawali dengan persiapan penyusunan renja, dilanjutkan dengan Penyusunan Rancangan Renja, Forum SKPD dan Penetapan Renja melalui Peraturan Bupati Kabupaten Natuna.

1. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Persiapan Penyusunan Renja Kecamatan Pulau Seluan mencakup :

a. Penyusunan rancangan Keputusan Camat Pulau Seluan tentang Pembentukan Tim Penyusunan Renja;
b. Orientasi mengenai Renja;
c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja;
d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

2. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah

Aktivitas dalam penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Pulau Seluan meliputi :

1) Perumusan Rancangan Renja, dan
2) Penyajian Rancangan Renja

Perumusan rancangan Renja Kecamatan Pulau Seluan mencakup :

a) Pengolahan data dan informasi;
b) Mereviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu berdasarkan Renstra;
c) Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi;
d) Telaahan terhadap rancangan awal Renja;
e) Perumusan tujuan dan sasaran;
f) Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
g) Perumusan kegiatan prioritas;
h) Penyajian awal dokumen rancangan Renja;
i) Penyempurnaan rancangan Renja;
j) Pembahasan Forum Perangkat Daerah;
k) Penyesuaian dokumen rancangan Renja sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.

3. Forum Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah bertujuan untuk penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Natuna berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan. Dalam Forum Perangkat Daerah ini rancangan Renja Kecamatan Pulau Seluan dibahas sehingga diperoleh masukan perbaikan program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

4. Penetapan Renja SKPD

Pada tahap ini, rancangan Renja Kecamatan Pulau Seluan yang telah disempurnakan dan sesuai dengan RKPD kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Renja Kecamatan Pulau Seluan memiliki keterkaitan dengan dokumen RKPD Kabupaten Natuna, Renstra Kecamatan Pulau Seluan dengan Renja Kementerian / Lembaga. Penyusunan Renja mengacu pada Rancangan Awal RKPD dan memperhatikan dokumen Renstra Kecamatan Pulau Seluan tahun 2022-2026 serta Renstra Kementerian / Lembaga tahun 2015 - 2019. Renja Kecamatan Pulau Seluan selanjutnya menjadi bahan dalam penyusunan RKA dan DPA.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Natuna Nomor 61 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 - 2021 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 65 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 – 2021 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 66);
14. Peraturan Bupati Natuna Nomor 40 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 40);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna tahun 2024 sebagai berikut :

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja adalah penjabaran tujuan, sasaran dan program kegiatan Kecamatan Pulau Seluan ke dalam rencana tahunan guna memberikan arah dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah.

2. Tujuan

Rencana Kerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1) Menjabarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan Kecamatan Pulau Seluan ke dalam program dan kegiatan tahunan sesuai dengan isu dan permasalahan mendesak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pulau Seluan;
2) Menetapkan tolak ukur dan target kinerja program dan kegiatan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi kinerja tahun 2024;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat daerah; Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2024, berisi tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, berisi tentang Program dan Kegiatan Tahun 2024.

Bab V Penutup, berisi tentang kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Pulau Seluan Tahun 2024.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PULAU SELUAN KABUPATEN NATUNA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna berjalan dengan baik. Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna mengelola anggaran belanja langsung sebesar Rp. 2,043,781,350.00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2,011,327,792.00 atau sebesar 98,41%.

Berikut ini diuraikan mengenai hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 2022 dan capaian Renstra Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna.

1. Daftar program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan meliputi :

   a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

   1) Pembinaan desa
   2) Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan

   b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

   1) Penyediaan jasa surat menyurat
   2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
   3) Penyediaan jasa kebersihan kantor
   4) Penyediaan alat tulis kantor
   5) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
   6) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
   7) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
   8) Penyediaan makanan dan minuman
   9) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
   10) Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
   11) Rapat-rapat koordinasi dalam daerah

   c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

   1) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
   2) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
   3) Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat angkutan
   4) Pembangunan konstruksi sarana penunjang perkantoran

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

e. Program Pembinaan Keagamaan

1) Pengiriman peserta MTQ/STQ

3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Pulau Seluan secara umum telah berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan dalam Renstra.
4. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil pada Penyusunan Renja tahun 2023 yaitu perlu dilakukan sinkronisasi kegiatan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung capaian target kinerja.

Tabel
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra
Kecamatan Pulau Seluan pada Tahun 2023

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2021		Target Kinerja Angaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2021 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah
											I		II		III		IV										
3	4	4A	5		6		7				8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100		16
			K	RP	K	RP	K	RP Renja	K	RP DPPA	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		**PERSENTASE**	**20**	**495,000,000**		0	**80**	**175,000,000**	**80**	**151,384,000**	**0**	**122,900,000**	**20**	**172,576,500**	**0**	**93,480,000**		**283,946,000**	**0**	**122,900,000**	**0**	**81.18**	**0**	**122,900,000**	**0**	**24.83**	Kecamatan Pulau Seluan
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	**Peringkat Prestasi MTQ Tingkat Kabupaten**	**Persentase**	**100**	**495,000,000**		**0**	1	**175,000,000**	1	**151,384,000**	0	**122,900,000**	20	**172,576,500**	20	**93,480,000**		**283,946,000**	**0**	**122,900,000**	**0**	**81.18**	**0**	**122,900,000**	**0**	**24.83**	Kecamatan Pulau Seluan
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan di Kelurahan	Jumlah Laporan	60	2,165,000,000			12	600,000,000	12	**400,311,000**		**101,100,000**		0		0		283,946,000	**0**	**101,100,000**	**0**	**25.26**	**0**	**101,100,000**	**0**	**4.67**	Kecamatan Bunguran Barat
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan MTQ/STQ	Jumlah Dokumen	5	495,000,000		0	100	175,000,000	100	151,384,000	0	0	34	57,840,000	0	93,480,000		0	**0**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	**0**	**0.00**	Kecamatan Bunguran Barat
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**NILAI LAPORAN LAKIP**	**80.2**	**250,000,000**	**79**	**40,800,000.00**	**3**	**5,633,072,700**	**2**	**4,394,560,190**	0	**1,006,515,582**	**17**	**114,736,500**	**17**	**114,736,500**	**46**	**19,050,000**	**0**	**1,006,515,582**	**0**	**22.90**	**79**	**1,047,315,582**	**99**	**418.93**	Kecamatan Bunguran Barat
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Predikat/Nilai Akuntabilitas**	**Persentase**	**80**	**250,000,000**	**79**	**40,800,000.00**	**81**	**80,000,000**	**81**	**40,800,000**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	-	**79**	**40,800,000**	**99**	**16.32**	Kecamatan Bunguran Barat
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	12	100,000,000				30,000,000	0	0		0		0		0			**0**	**0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	Kecamatan Pulau Seluan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan	10	150,000,000	2	40,800,000.00	2	50,000,000	2	40,800,000	0	0		0		0	46	19,050,000	**0**	**0**	**0**	-	**2**	**40,800,000**	**20**	**27.20**	Kecamatan Bunguran Barat
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**PERSENTASE LAYANAN**	**90**	**24,772,950,000**		**0**				**4,820,316,835**		**1,006,515,582**							**0**	**1,006,515,582**	**#DIV/0!**	**20.88**	**0**	**1,006,515,582**	**0**	**4.06**	Kecamatan Pulau Seluan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase	**1**	**19,549,352,000**		**0**	1	**3,909,872,700**	1	**3,455,701,535**	**27**	**814,145,114**	**25**	**759,352,522**	**25**	**882,737,374**	**26**	**930,841,591**	**27**	**814,145,114**	**2700**	**23.56**	**27**	**814,145,114**	**2,700**	**4.16**	Kecamatan Pulau Seluan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai	Jumlah Orang	28	19,549,352,000		0	27	3,909,872,700	27	3,455,701,535	27	814,145,114	25	759,352,522	25	882,737,374	26	930,841,591	**27**	**814,145,114**	**100**	**23.56**	**27**	**814,145,114**	**96**	**4.16**	Kecamatan Pulau Seluan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Kehadiran Pegawai**	**Persentase**	**95**	**420,000,000**		**0**	**95**	**105,000,000**	**95**	**30,000,000**		**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	**0**	**0.00**	Kecamatan Pulau Seluan
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Kelengkapannya	Jumlah Paket	5	150,000,000		0	27	30,000,000	27	30,000,000		0	0	0	0	0	**0**	0	**0**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	**0**	**0.00**	Kecamatan Bunguran Barat
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis	Jumlah Orang	7	270,000,000		0	5	75,000,000	5	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**#DIV/0!**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	Kecamatan Bunguran Barat
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase**	**70**	**1,346,000,000**		**187,246,000**	**75**	**674,200,000**	**75**	**479,455,000**		**47,601,000**	**?**	**66,401,220**	**?**	**22,250,500**	**56**	**268,644,000**	**0**	**47,601,000**	**0**	**9.93**	**0**	**234,847,000**	**0**	**17.45**	Kecamatan Pulau Seluan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket	60	300,000,000		-	16	225,000,000	16	140,000,000		0	0	0	0	0	65	91,900,000	**0**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	**0**	**0.00**	Kecamatan Pulau Seluan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor	Jumlah Paket	60	60,000,000	11	8,927,000	12	12,000,000	12	27,000,000	18	4,372,000	27	6,559,000	0	4,462,000	36	9,933,000	**18**	**4,372,000**	**150**	**16.19**	**29**	**13,299,000**	**48**	**22.17**	Kecamatan Pulau Seluan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket	60	50,000,000	11	5,300,000	12	42,000,000	12	24,000,000	11	1,400,000	11	1,400,000	0	1,450,000	41	10,000,000	**11**	**1,400,000**	**91.666666667**	**5.83**	**22**	**6,700,000**	**37**	**13.40**	Kecamatan Pulau Seluan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Penggandaan Kantor	Jumlah Paket	60	180,000,000	11	19,825,000	12	36,000,000	12	20,000,000	16	2,994,000	23	4,304,000	0	3,201,500	46	9,350,000	**16**	**2,994,000**	**133.33333333**	**14.97**	**27**	**22,819,000**	**45**	**12.68**	Kecamatan Pulau Seluan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen	60	25,000,000		-	12	4,000,000	0			0		0		0			**0**	**0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	Kecamatan Pulau Seluan
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket	5	25,000,000		-	10	48,000,000	10	37,140,000	0	0	49	14,979,000	0	6,021,000	43	16,110,000	**0**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	**0**	**0.00**	Kecamatan Bunguran Barat
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	40	670,000,000	159	153,194,000	8	300,000,000	8	231,315,000	16	38,835,000	16	39,159,220	0	7,116,000	58	131,351,000	**16**	**38,835,000**	**200**	**16.79**	**175**	**192,029,000**	**438**	**28.66**	Kecamatan Bunguran Barat
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Arsip dinamis yang disusun	Jumlah Dokumen	50	36,000,000		-	10	7,200,000	0			0		0		0			**0**	**0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	Kecamatan Pulau Seluan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Peningkatan Sarana Penunjang Perkantoran**	**Persentase**	**70**	**200,000,000**			**75**	**40,000,000**	**75**	**35,000,000**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**			**0**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	**0**	**0.00**	Kecamatan Pulau Seluan
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor	Jumlah Unit	10	200,000,000			1	40,000,000	1	35,000,000	0	0		0		0			**0**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	**0**	**0.00**	Kecamatan Pulau Seluan

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Peningkatan Kepuasan Pengguna**	**Persentase**	**100**	**2,560,000,000**		**380,262,235**	**80**	**512,000,000**	**80**	**595,300,000**	**19**	**118,699,468**	**25**	**151,695,027**	**25**	**113,423,768**	**29**	**219,487,038**	**19**	**118,699,468**	**23.75**	**19.94**	**19**	**498,961,703**	**19**	**19.49**	Kecamatan Bunguran Barat
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Materai Kantor	Jumlah Laporan	60	30,000,000	11	1,000,000	12	6,000,000	12	2,000,000	50	1,000,000	50	1,000,000	50	0		1,300,000	**50**	**1,000,000**	**416.66666667**	**50.00**	**61**	**2,000,000**	**102**	**6.67**	Kecamatan Bunguran Barat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Tagihan Internet, Air dan Listrik Kantor	Jumlah Laporan	60	180,000,000	11	27,607,086	12	36,000,000	12	37,300,000	19	7,223,973	15	5,735,796	15	7,205,507		8,015,415	**19**	**7,223,973**	**158.33333333**	**19.37**	**30**	**34,831,059**	**50**	**19.35**	Kecamatan Bunguran Barat
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Honorer/PTT	Jumlah Laporan	60	2,350,000,000	11	351,655,149	12	470,000,000	12	556,000,000	19	110,475,495	26	144,959,231	26	106,218,261		210,171,623	**19**	**110,475,495**	**158.33333333**	**19.87**	**30**	**462,130,644**	**50**	**19.67**	Kecamatan Pulau Seluan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang dipelihara**	**Persentase**	**80**	**697,598,000**		**170,761,266**	**75**	**312,000,000**	**75**	**224,860,000**	**11**	**26,070,000**	**11**	**25,236,500**	**11**	**32,324,700**	**54**	**144,257,800**	**11**	**26,070,000**	**14.666666667**	**11.59**	**11**	**196,831,266**	**14**	**28.22**	Kecamatan Pulau Seluan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Lapangan yang dipelihara	Jumlah Kendaraan	16	230,000,000	7	133,789,500	4	150,000,000	4	159,000,000	11	18,870,000	13	21,986,500	13	26,074,700	61	129,307,800	**11**	**18,870,000**	**275**	**11.87**	**18**	**152,659,500**	**113**	**66.37**	Kecamatan Bunguran Barat
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	Jumlah Gedung	12	407,598,000	2	31,106,766	2	150,000,000	2	47,860,000	7	3,600,000	5	2,400,000	5	4,800,000	9	3,600,000	**7**	**3,600,000**	**350**	**7.52**	**9**	**34,706,766**	**75**	**8.51**	Kecamatan Bunguran Barat
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana	30	60,000,000	11	5,865,000	5	12,000,000	5	18,000,000	20	3,600,000	4	850,000	4	1,450,000	63	11,350,000	**20**	**3,600,000**	**400**	**20.00**	**31**	**9,465,000**	**103**	**15.78**	Kecamatan Pulau Seluan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		**PERSENTASE**	**100**	**1,245,607,000**	**13**	**349,371,000**	**100**	**326,342,000**	**0**	**657,953,000**	**0**	**0**		**0**		**0**			**0**	**0**	**#DIV/0!**	**-**	**13**	**349,371,000**	**13**	**28.05**	Kecamatan Pulau Seluan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	**Jumlah Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan di Kecamatan**	**Jumlah Koordinasi**	**70**	**1,245,607,000**	**13**	**349,371,000**	**14**	**326,342,000**	**14**	**657,953,000**	0	**0**		**0**		**0**			**0**	**0**	**0**	**-**	**13**	**349,371,000**	**18**	**28.05**	Kecamatan Pulau Seluan
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan di Kecamatan	Jumlah Laporan	60	1,245,607,000	11	349,371,000	10	326,342,000	10	657,953,000	18	122,900,000	17	114,736,500	17	151,484,000	28	7,780,000	**18**	**122,900,000**	**180**	**18.68**	**29**	**472,271,000**	**48**	**37.91**	Kecamatan Pulau Seluan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		**PERSENTASE**	**100**	**270,000,000**			**50**	**70,000,000**	**50**	**56,020,000**	**0**	**0**		**0**		**0**			**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	Kecamatan Pulau Seluan
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat**	**Jumlah Koordinasi**	**12**	**20,000,000**			**12**	**40,000,000**	**12**	**27,510,000**	**0**	**0**		**0**		**0**	**28**	**7,780,000**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	Kecamatan Bunguran Barat
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang dibina	Jumlah Laporan	12	20,000,000			4	40,000,000	4	27,510,000	0	0		0		1,350,000	28	7,780,000	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	Kecamatan Bunguran Barat
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Persentase Swadaya Masyarakat Aktif**	**Persentase**	**100**	**250,000,000**			**100**	**30,000,000**	**100**	**28,510,000**	**0**	**0**		**0**		**0**	**48**	**13,764,000**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	Kecamatan Bunguran Barat
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah PKK dan Karang Taruna yang dibina	Jumlah Lembaga	12	250,000,000			6	30,000,000	6	28,510,000	0	0		0		450,000	48	13,764,000	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	Kecamatan Bunguran Barat
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**PERSENTASE**	**20**	**100,000,000**			**30**	**20,000,000**	**30**	**26,210,000**	**0**	-		**0**		**0**			**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	Kecamatan Pulau Seluan
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan**	**Persentase**	**100**	**100,000,000**			**80**	**20,000,000**	**80**	**26,210,000**		**0**		**0**		**0**		**11,958,500**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	Kecamatan Pulau Seluan
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi	Jumlah Laporan	60	100,000,000			4	20,000,000	4	26,210,000	0	0		0		0		11,958,500	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	Kecamatan Pulau Seluan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		**PERSENTASE**	**100**	**2,165,000,000**			**100**	**600,000,000**	**0**	**400,311,000**	**0**	**101,100,000**		**0**		**0**			**0**	**101,100,000**	**#DIV/0!**	**25.26**	**0**	**101,100,000**	**0**	**4.67**	Kecamatan Bunguran Barat
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	**Jumlah Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan di Kecamatan**	**Jumlah Koordinasi**	**70**	**2,165,000,000**			**14**	**600,000,000**	**14**	**400,311,000**		**101,100,000**		**0**		**0**			**0**	**101,100,000**	**0**	**25.26**	**0**	**101,100,000**	**0**	**4.67**	Kecamatan Pulau Seluan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		**PERSENTASE**	**100**	**3,250,000,000**				**800,000,000**		**0**		**0**		**0**		**0**			**0**	**0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	Kecamatan Pulau Seluan
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Persentase partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan**	**Jumlah Koordinasi**	**4**	**3,250,000,000**			**1**	**800,000,000**		**0**		**0**		**0**		**0**			**0**	**0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	Kecamatan Pulau Seluan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga	36	3,250,000,000			6	800,000,000						0		0			**0**	**0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	Kecamatan Pulau Seluan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna pada tahun 2023 secara keseluruhan relatif baik. Hal ini terlihat dari sebanyak 8 indikator program yang ditargetkan dalam Renja tahun 2023, semuanya telah tercapai sesuai dengan target. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian target kinerja pada urusan perencanaan pembangunan dan urusan Penelitian dan Pengembangan tergolong baik.

Secara rinci capaian kinerja pelayanan Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna disajikan pada Tabel 2.2

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Pulau Seluan TAHUN 2023

Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan (2022)	Target Kinerja Akhir Renstra (2026)	Target dan Realisasi Kinerja Tahun Renstra Ke-1 (2022)			Target dan Realisasi Kinerja Tahun Renstra Ke-2 (2023)		
					Target Kinerja Renja tahun 2022	Realisasi Kinerja Renja tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2022 (%)	Target Kinerja Renja tahun 2023	Realisasi Kinerja Renja tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2023 (%)
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai Laporan LkjIP	Nilai	69.50	70.00	69.50	0.00	0.00	69.50	64.00	80.40
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persen	80	90	80	0.0 0	0.00	85	85	100
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik	Persen	100	100	100	0.00	0.00	100	100	100
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemenuhan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	100	100	0.00	0.00	100	100	100
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemenuhan Koordinasi Pemberdayaan Kemasyarakatan	Persen	100	100	100	100	0.00	100	100	100

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan perangkat daerah, serta kajian terhadap pencapaian kinerja renstra perangkat daerah, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja renstra perangkat daerah.

Sebelum dirumuskan isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, akan dijelaskan dahulu beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yaitu sebagai berikut :

1) Beberapa permasalahan dalam peningkatan pelayanan Kecamatan Pulau Seluan adalah sebagai berikut :
   a) Belum optimalnya kualitas aparatur.
   b) Belum optimalnya tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat.
   c) Belum optimalnya pembenahan dan peningkatan infrastruktur di wilayah Kecamatan Pulau Seluan.
   d) Masih lemahnya integrasi data antara Kecamatan Pulau Seluan dengan perangkat daerah.
2) Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Pulau Seluan adalah sebagai berikut :
   a) Tuntutan masyarakat terhadap kualitas dan transparansi dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan semakin meningkat, menjadi tantangan untuk terus memperbaiki proses dan meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, serta mendorong perangkat daerah untuk mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan.
   b) Perkembangan peraturan dan kebijakan pembangunan nasional yang berubah-ubah menuntut adanya penyesuaian-penyesuaian terhadap kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga tercipta sinergitas pembangunan.
   c) Kualitas pembangunan manusia yang yang belum optimal
   d) Kualitas dan kuantitas infrastruktur belum memadai
   f) Komunikasi yang kurang memadai

3) Peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Pulau Seluan adalah sebagai berikut :

a) Banyaknya bimbingan teknis dan pelatihan yang dapat meningkatkan kapasitas aparatur.
b) Banyaknya bimbingan teknis dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat.
c) Banyaknya pembenahan infrastruktur di wilayah Kecamatan Pulau Seluan.

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan dokumen RKPD Kabupaten Natuna tahun 2022, secara umum telah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan. Hal ini terlihat dari rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan awal RKPD sudah selaras dan anggarannya telah sesuai dengan kebutuhan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan RPJMN 2020 - 2024, Visi Misi Presiden 2020 – 2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2005 – 2025. RPJMN 2020 – 2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**, yang diwujudkankan ke dalam 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu :

1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2) Penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5) Memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8) Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam rangka melaksanakan visi dan misi tersebut ditetapkan 7 (tujuh) agenda pembangunan tahun 2020 – 2024 yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui :

a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
b. Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofishery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui :

a. Pengembangan sektor/ komoditas/ kegiatan unggulan daerah;
b. Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
c. Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
d. Memperkuat kemampuan SDM dan iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta
e. Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing, yang dititik beratkan pada pemenuhan layanan dasar.

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui :

a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
f. Pengentasan kemiskinan; dan
g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui :

a. Memperkukuh ketahanan budaya bangsa;
b. Memajukan kebudayaan;
c. Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama;
d. Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga; dan
e. Meningkatkan budaya literasi.

5. Memperkuat Infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Penguatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui :

a. Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
b. Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
c. Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
d. Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
e. Mempermudah perizinan pembangunan infrastruktur.

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan :

a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
c. Pembangunan Rendah Karbon.

7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui :

a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
b. Meningkatkan Hak Hak Politik Dan Kebebasan Sipil,
c. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber,
d. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi dan
e. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri

Pembangunan nasional jangka menengah dilaksanakan untuk mencapai sasaran utama pembangunan nasional di tahun 2024, antara lain meliputi :

a. Kemiskinan;
b. Lapangan Kerja;
c. Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
d. Industri;

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024: **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**, maka maka fokus pembangunan diarahkan kepada pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pelayanan Pendidikan dan kesehatan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan IKN, dan pelaksanaan Pemilu 2024," Adapun target sasaran pembangunan RKP Tahun 2024 adalah pertumbuhan ekonomi 5,3-5,7 persen, tingkat kemiskinan 6,5-7,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,0-5,7. Rasio Gini 0,374-0,377, indeks pembangunan manusia 73,99-74,02, penurunan emisi gas rumah kaca 27,27, Nilai Tukar Petani 107-110, dan Nilai Tukar Nelayan 105-108.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2024 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 8 (delapan) arahan utama Presiden, sebagai berikut: (1) Kendalikan inflasi. Pantau langsung harga di lapangan. Hati-hati mengatur tarif (PDAM, angkutan umum), (2) Turunkan kemiskinan ekstrem sampai target 0% pada 2024, (3) Fokus turunkan stunting, (4) Perhatikan investasi. Jangan ada izin yang berbulan-bulan, (5) Pastikan APBD dibelanjakan untuk produk-produk buatan dalam negeri, (6) Kabupaten/kota harus mulai mendesain kotanya dengan baik sehingga memiliki diferensiasi dan memaksimalkan potensi daerah, (7) Jaga stabilitas politik dan keamanan menuju pada Pemilu 2024, dan (8) Jamin kebebasan beragama. Jangan sampai konstitusi kalah oleh kesepakatan.

Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 diarahkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan isu strategis pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau yaitu **"Peningkatan Investasi dan Daya Saing Daerah untuk Kemakmuran Rakyat Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-nilai Budaya Melayu dan Nasional".** Pembangunan di Kepulauan Riau pada tahun 2024 mempunyai prioritas yaitu:

1. Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah
2. Pembangunan Infrastruktur Wilayah; dan
3. Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya

Berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dan prioritas pembangunan provinsi tahun 2024 sehingga penyelarasan prioritas pembangunan daerah, program serta kegiatan tahunan daerah dengan tema **"Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan di Dukung dengan Akselerasi Kualitas Sumber Daya Manusia"**

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna mendorong pelaksanaan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, serta penyelenggaraan penelitian dan pengembangan yang mengarah pada pencapaian prioritas pembangunan.

Dan untuk mewujudkan visi tersebut berikut adalah **Misi** yang akan dipenuhi Bupati dan Wakil Bupati Natuna **:**

M I S I	
1.	**Akselerasi peningkatan kualitas SDM;**
2.	**Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal;**
3.	**Menciptakan kawasan perbatasan yang aman, strategis dan eksotis;**
4.	**Akselerasi pembangunan infrastruktur yang tertib dan teratur;**
5.	**Menciptakan kualitas, daya tampung, dan daya dukung lingkungan hidup**
6.	**Menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (SMART BERAEUCRACY);**
7.	**Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.**

3.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi. Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan menggambarkan kondisi yang ingin dicapai di masa depan dengan lebih mengoperasionalkan pelaksanaan misi. Tujuan juga mencerminkan adanya prioritas program dan kegiatan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Melalui perumusan tujuan diharapkan dapat menunjuk suatu kondisi yang ingin dicapai ke depan atau mengarahkan perumusan sasaran tahunan, arah kebijaksanaan, pogram serta kegiatan. Tujuan Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna konsisten dengan tugas pokok dan fungsinya secara kolektif menggambarkan arah strategisnya dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, bisa dicapai, rasional untuk jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan demikian sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran

adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

Sasaran Kecamatan Pulau Seluan merupakan gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) tahun atau kurang dari 1 tahun guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan untuk 5 tahun ke depan. Indikator kinerja diperlukan dalam pengukuran atau penilaian keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran.

Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistim pengumpulan dan pengolahan data / informasi untuk menentukan kinerja kegiatan, program dan kebijakan. Penetapanan indikator kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator kinerja masukan dan keluaran dapat dinilai sebelum kegiatan selesai, karena masukan adalah semua bahan termasuk orang, material, alat, dan uang yang digunakan dalam proses untuk menghasilkan output.

Sedangkan keluaran adalah suatu wujud atau keadaan yang diciptakan melalui proses yang mempunyai nilai tambah untuk dimanfaatkan. Untuk indikator hasil, manfaat, dan dampak akan diperoleh setelah kegiatan selesai, namun perlu diantisipasi sejak tahap perencanaan. Hasil adalah kegunaan langsung dari output atau manfaat suatu output ditinjau dari maksud atau sasaran output tersebut dihasilkan, manfaat adalah kegunaan lebih lanjut yang diharapkan dikaitkan dengan tujuan jangka menengah. Sedangkan dampak adalah kegunaan akhir dari output yang berkaitan dengan tujuan jangka panjang atau tujuan akhir.

Penetapan Sasaran Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna untuk periode Renstra 2016-2021 beserta indikator capaiannya diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Tujuan Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna adalah menciptakan pemerintah Kecamatan yang bersih, berwibawa dengan memberikan pelayanan prima. sedangkan sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan.

Tabel tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Tahun 2024

MISI 6 : Menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (SMART BERAEUCRACY);			
Tujuan	**Indikator Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Sasaran**
Meningkatnya pengamalan agama	**Indeks Kerukunan Umat Beragama**	**Meningkatnya Pengamalan Agama Didalam Kehidupan Masyarakat**	**Persentase Rumah Ibadah/Madrasah yang Aktif**
Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Dalam Mematuhi Peraturan dan Memberikan Perlindungan Kepada Masyarakat	**Angka Kriminalitas**	**Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**	Persentase Angka Kriminalitas
Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel**	Indeks Reformasi Birokrasi
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima			

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran beserta Program Tahun 2024
Pemerintah Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Indikator Sasaran 2024	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program Tahun 2024
Meningkatnya pengamalan agama	Meningkatnya pembinaan dibidang keagamaan tingkat kecamatan	Persentase Rumah Ibadah	Persen	80	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pemenuhan koordinasi dibidang keagamaan	Persen	100
Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Dalam Mematuhi Peraturan dan Memberikan Perlindungan Kepada Masyarakat	Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada	Persentase Angka Kriminalitas	Persen	80	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persen	20
Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	80.20	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Nilai	85
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	3.70	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemenuhan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna pada tahun 2022 yaitu sebagai berikut :

a. Mengarah pada perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan yang mengarah pada pencapaian visi dan misi Bupati sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2016-2021;

b. Mengarahkan pada penanganan permasalahan dan isu strategis dalam pelaksanaan pelayanan Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna sebagaimana tertuang dalam Renstra tahun 2016-2021.

Secara rinci program dan kegiatan serta Pagu Indikatif yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna tahun 2024 tertuang dalam Tabel berikut ini (Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025).

RUMUSAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KABUPATEN NATUNA

PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PULAU SELUAN

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2024 (TAHUN RENCANA)				CATATAN PENTING	PRAKIRAAIN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
8	**KECAMATAN PULAU SELUAN**					5,756,711,496				5,756,711,496
08.01.	**KECAMATAN PULAU SELUAN**					5,756,711,496				5,756,711,496
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**					105,000,000				105,000,000
4.01.	**SEKRETARIAT DAERAH**					105,000,000				105,000,000
4.01.02.	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI DIBIDANG KEAGAMAAN**	PERSEN		20	105,000,000			20	105,000,000
4.01.02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Persen		100	105,000,000			100	105,000,000
4.01.02.2.02.01.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	Kecamatan Pulau Seluan	1	105,000,000			1	105,000,000
	Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Dokumen	Kabupaten Natuna	1	105,000,000	APBD	Pelaksanaan STQ dan MTQ Kecamatan	1	105,000,000
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**					5,651,711,496				5,651,711,496
7.01.	**KECAMATAN**					5,651,711,496				5,651,711,496
7.01.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**NILAI LAPORAN LKJIP**	NILAI		79.8	50,000,000			80	50,000,000
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen		76	50,000,000			78	50,000,000

7.01.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Kecamatan Bunguran Barat	3	20,000,000			2	20,000,000
	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen	Kecamatan Pulau Seluan	2	20,000,000	APBD	Dokumen RKT dan Renja	2	20,000,000
7.01.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	Kecamatan Pulau Seluan	2	30,000,000			2	30,000,000
	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan	Kecamatan Bunguran Barat	2	30,000,000	APBD	Laporan LAKIP dan Keuangan	2	30,000,000
7.01.01.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP**	PERSEN		85	5,184,070,496			90	5,184,070,496
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu		1	3,909,870,496			1	3,909,870,496
7.01.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	Kecamatan Bunguran Barat	28	3,909,870,496			28	3,909,870,496
	Penerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/bulan	Kecamatan Pulau Seluan	28	3,909,870,496	APBD	Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN	28	3,909,870,496
7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen		95	90,000,000			95	90,000,000
7.01.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	Kecamatan Pulau Seluan	1	30,000,000			1	30,000,000
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Paket	Kecamatan Pulau Seluan	1	30,000,000	APBD	Pengadaan Pakaian Dinas	1	30,000,000

7.01.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Kecamatan Bunguran Barat	4	60,000,000			4	60,000,000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Orang	Kecamatan Pulau Seluan	4	60,000,000	APBD	Bimtek ASN	4	60,000,000
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen		60	280,200,000			65	280,200,000
7.01.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Kecamatan Bunguran Barat	12	60,000,000			12	60,000,000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Paket	Kecamatan Pulau Seluan	12	60,000,000	APBD	Penyediaan ATK, Alat dan Bahan Pembersih Kantor	12	60,000,000
7.01.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Kecamatan Pulau Seluan	12	12,000,000			12	12,000,000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Paket	Kecamatan Pulau Seluan	12	12,000,000	APBD	Penyediaan peralatan dapur kantor	12	12,000,000
7.01.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Kecamatan Pulau Seluan	12	10,000,000			12	10,000,000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Paket	Kecamatan Pulau Seluan	12	10,000,000	APBD	Penyediaan susu, teh, kopi, gula dll	12	10,000,000
7.01.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Kecamatan Pulau Seluan	12	36,000,000			12	36,000,000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Paket	Kecamatan Pulau Seluan	12	36,000,000	APBD	Penyediaan cetak dan penggandaan (fotocopy)	12	36,000,000
7.01.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	Kecamatan Pulau Seluan	1	5,000,000			1	5,000,000

	Penyediaan Bahan/Material		Paket	Kecamatan Pulau Seluan	1	5,000,000	APBD	-	1	5,000,000
7.01.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Kecamatan Pulau Seluan	8	150,000,000			8	150,000,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Laporan	Kecamatan Pulau Seluan	8	150,000,000	APBD	Pelaksanaan SPPD, Makan minum rapat dan tamu	8	150,000,000
7.01.01.2.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	Kecamatan Pulau Seluan	10	7,200,000			10	7,200,000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Dokumen	Kecamatan Pulau Seluan	10	7,200,000	APBD	Penatausahaan Arsip	10	7,200,000
7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen		60	170,000,000			65	170,000,000
7.01.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Kecamatan Pulau Seluan	2	40,000,000			2	40,000,000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua Operasional atau Lapangan		Unit	Kecamatan Pulau Seluan	1	40,000,000	APBD	Kendaraan Roda Dua	1	40,000,000
7.01.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Kecamatan Pulau Seluan	5	20,000,000			5	20,000,000
	Pengadaan Kursi kerja		Unit	Kecamatan Pulau Seluan	1	4,000,000	APBD	Kursi Kerja	1	4,000,000
	Pengadaan Lemari Arsip		Unit	Kecamatan Pulau Seluan	1	5,000,000	APBD	Lemari Arsip	1	5,000,000
	Pengadaan Lemari Kayu		Unit	Kecamatan Pulau Seluan	1	6,000,000	APBD	Lemari kayu	1	6,000,000

	Pengadaan Meja Kerja		Unit	Kecamatan Pulau Seluan	1	5,000,000	APBD	Meja Kerja	1	5,000,000
7.01.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Kecamatan Pulau Seluan	5	100,000,000			5	100,000,000
	Pengadaan CCTV		Unit	Kecamatan Pulau Seluan	1	2,000,000	APBD	-	1	2,000,000
	Pengadaan Drown		Unit	Kecamatan Pulau Seluan	1	15,000,000	APBD	-	1	15,000,000
	Pengadaan Hardisc		Unit	Kecamatan Pulau Seluan	2	2,000,000	APBD	-	2	2,000,000
	Pengadaan HT		Unit	Kecamatan Pulau Seluan	2	4,000,000	APBD	-	2	4,000,000
	Pengadaan Infocus		Unit	Kecamatan Pulau Seluan	1	15,000,000	APBD	-	1	15,000,000
	Pengadaan Kamera		Unit	Kecamatan Pulau Seluan	1	5,000,000	APBD	-	1	5,000,000
	Pengadaan Kipas Angin		Unit	Kecamatan Pulau Seluan	2	1,000,000	APBD	-	2	1,000,000
	Pengadaan Komputer PC		Unit	Kecamatan Pulau Seluan	1	10,000,000	APBD	Komputer PC	1	10,000,000
	Pengadaan Kulkas		Unit	Kecamatan Pulau Seluan	1	2,000,000	APBD	-	1	2,000,000
	pengadaan Laptop		Unit	Kecamatan Pulau Seluan	1	10,000,000	APBD	Laptop	1	10,000,000

	Pengadaan Mesin Bor		Unit	Kecamatan Pulau Seluan	1	1,000,000	APBD	-	1	1,000,000
	Pengadaan Pembersih lantai		Unit	Kecamatan Pulau Seluan	1	2,000,000	APBD	-	1	2,000,000
	Pengadaan Pendingin Ruangan		Unit	Kecamatan Pulau Seluan	1	6,000,000	APBD	-	1	6,000,000
	Pengadaan Printer		Unit	Kecamatan Pulau Seluan	1	3,000,000	APBD	Printer	1	3,000,000
	Pengadaan Scanner		Unit	Kecamatan Pulau Seluan	1	2,000,000	APBD	-	1	2,000,000
	Pengadaan Sound Sistem		Unit	Kecamatan Pulau Seluan	1	15,000,000	APBD	-	1	15,000,000
	Pengadaan TV		Unit	Kecamatan Pulau Seluan	2	5,000,000	APBD	-	2	5,000,000
7.01.01.2.07.07.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	Kecamatan Pulau Seluan	2	10,000,000			2	10,000,000
	Pengadaan Tenda		Unit	Kecamatan Pulau Seluan	2	10,000,000	APBD	-	2	10,000,000
7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	Persen		100	512,000,000			100	512,000,000
7.01.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Kecamatan Pulau Seluan	12	6,000,000			12	6,000,000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan	Kecamatan Pulau Seluan	12	6,000,000	APBD	Penyediaan Materai	12	6,000,000

7.01.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Keca matan Pulau Selua	12	36,000,000			12	36,000,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Laporan	Kecamatan Pulau Seluan	12	36,000,000	APBD	Tagihan Listri dan Air	12	36,000,000
7.01.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Kecamatan Pulau Seluan	12	470,000,000			12	470,000,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Laporan	Keca matan Pulau Selua	12	470,000,000	APBD	Pembayaran Gaji Tenaga Honorer/Kontrak/Harlep	12	470,000,000
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen		70	222,000,000			75	222,000,000
7.01.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Keca matan Pulau Selua	4	50,000,000			4	50,000,000
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Unit	Kecamatan Bunguran Barat	4	50,000,000	APBD	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	4	50,000,000
7.01.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Kecamatan Pulau Seluan	5	20,000,000			5	20,000,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Unit	Kecamatan Pulau Seluan	5	20,000,000	APBD	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5	20,000,000
7.01.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Kecamatan Pulau Seluan	3	90,000,000			3	90,000,000
	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Unit	Kecamatan Pulau Seluan	3	90,000,000	APBD	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Mess Kecamatan	3	90,000,000
7.01.01.2.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Kecamatan Pulau Seluan	2	50,000,000			2	50,000,000

	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Unit	Kecamatan Bunguran Barat	2	50,000,000	APBD	Pemeliharaan Papan Plang nama, tempat Parkir, Pagar Kantor Halaman Kantor	2	50,000,000
7.01.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Kecamatan Pulau Seluan	5	12,000,000			5	12,000,000
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Unit	Kecamatan Pulau Seluan	5	12,000,000	APBD	Pemeliharaan WC	5	12,000,000
7.01.02.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	PERSEN		100	267,641,000			100	267,641,000
7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di kecamatan	Koordinasi		60	267,641,000			65	267,641,000
7.01.02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Kecamatan Pulau Seluan	12	267,641,000			12	267,641,000
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Laporan	Kecamatan Bunguran Barat	12	267,641,000	APBD	Operasional Kegiatan di Kecamatan	12	267,641,000
7.01.03.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN**	PERSEN		100	50,000,000			100	50,000,000
7.01.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Persen		100	50,000,000			100	50,000,000
7.01.03.2.03.02.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Bunguran Barat	6	50,000,000			6	50,000,000
	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan		Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Pulau Seluan	6	50,000,000	APBD	Pembinaan PKK Kecamatan, Kelurahan dan desa	6	50,000,000
7.01.04.	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	PERSEN		20	20,000,000			15	20,000,000

7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase koordinasi pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada	Persen		90	20,000,000			90	20,000,000
7.01.04.2.02.01.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	Kecamatan Pulau Seluan	12	20,000,000			12	20,000,000
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Laporan	Kecamatan Bunguran Barat	12	20,000,000	APBD	Koordinasi terkait Perbup dan Perkada tentang Trantib	12	20,000,000
7.01.06.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	PERSEN		100	80,000,000			100	80,000,000
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	Persen		100	80,000,000			100	80,000,000
7.01.06.2.01.09.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	Kecamatan Bunguran Barat	5	40,000,000			5	40,000,000
	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		Dokumen	Kecamatan Pulau Seluan	5	40,000,000	APBD	Musrenbang Desa,Kelurahan dan Kecamatan	5	40,000,000
7.01.06.2.01.18.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan	Kecamatan Pulau Seluan	12	40,000,000			12	40,000,000
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		Laporan	Kecamatan Bunguran Barat	12	40,000,000	APBD	Pembinaan Desa	12	40,000,000
JUMLAH						**5,756,711,496**				**5,756,711,496**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah, serta menghasilkan penelitian dan pengembangan yang bermanfaat guna mendukung pencapaian visi Kabupaten Natuna tahun 2021-2026.

Untuk mencapai hal tersebut langkah-langkah yang diambil sebagai kaidah pelaksanaan kegiatan yaitu :

1. Seluruh pajabat struktural di Kecamatan Bunguran Barat agar mengawal pelaksanaan Renja tahun 2024 sebaik-baiknya sehingga dapat teranggarkan dan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan program kerja tahun 2024 harus melalui proses yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah yang berlaku;
3. Guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan Renja berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2024.

Rencana tindak lanjut dalam merespon dimasa yang akan datang melalui prioritas kegiatannya adalah :

1. Seluruh unsur di Kecamatan Pulau Seluan melaksanakan program dan kegiatan Renja Tahun 2024 sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
2. Camat dibantu Sekretariat melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan dengan baik.

Adanya Renja Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna Tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan pada urusan perencanaan pembangunan dan urusan penelitian dan pengembangan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan perangkat daerah yang lain. Semoga dengan tersusunnya Renja Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna Tahun 2024 mendorong peningkatan kualitas kinerja dapat perannya sebagai perangkat daerah yang menangani urusan Perencanaan Pembangunan dan Urusan Penelitian dan Pengembangan.

Selain itu diharapkan Rencana Kerja tahun 2024 ini mampu mendorong pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Pulau Seluan Kabupaten Natuna yang telah ditetapkan dan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026.

Ranai, Januari 2024

CAMAT,

EMIL LISMANA, SE.,MM.

NIP. 197812312003121017